DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN. 2721-4907
Volume 7, Nomor 2, Oktober 2026

MODEL KOLABORATIF PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA BERBASIS RUMAH BELAJAR DESA DI KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT

Collaborative Model of Village Economic Empowerment Based on Village Learning Houses in Tanjung Palas Barat District

Wines Ruruk[1], A. Nur Insan[2], Nurmadhani Fitri Suyuthi[3]
Email: winesruruk@gmail.com[1], a.nurinsan@unifa.ac.id[2], nurmadhani@unifa.ac.id[3]
[1,2,3]Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen, Universitas Fajar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101 (*exRacing Center*), Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kapasitas SDM, dinamika kolaborasi *stakeholder*, kontribusi ekonomi, serta merumuskan model kolaboratif pemberdayaan desa melalui Program Rumah Belajar Desa di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan pada dua desa *pilot project* (Long Beluah dan Long Sam). Sepuluh informan dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*, mencakup unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, NGO, akademisi, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Belajar Desa berfungsi sebagai ruang belajar nonformal yang menguatkan kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat, khususnya perempuan, melalui metode Sekolah Lapang. Program ini mendorong hilirisasi komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah yang difasilitasi perizinan P-IRT dan sertifikasi Halal. Keberhasilan ditopang model *collaborative governance* berbasis *Pentahelix* yang menyinergikan pemerintah, NGO, akademisi, dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan sintesis model kolaboratif berbasis komponen *input*, *process*, dan *output/outcome* yang berpotensi direplikasi pada wilayah perdesaan lain.

Kata Kunci: Model Kolaboratif, Pemberdayaan Desa, Rumah Belajar Desa, *Collaborative Governance,* Ekonomi Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze human resource capacity strengthening, stakeholder collaboration dynamics, economic contributions, and to formulate a collaborative model of village empowerment through the Rumah Belajar Desa (Village Learning House) Program in West Tanjung Palas District, Bulungan Regency. A qualitative case study approach was applied to two pilot villages (Long Beluah and Long Sam). Ten informants were selected through purposive and snowball sampling, covering regency, sub-district, and village governments, an NGO, academics, and community members. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, with validity ensured through triangulation. The findings show that the Village Learning House functions as a non-formal learning space strengthening community capacity and self-confidence, particularly among women, through a participatory field school method. The program encourages downstream processing of local commodities into value-added products supported by licensing and Halal certification. Success is underpinned by a Pentahelix-based collaborative governance model synergizing government, NGOs, academics, and the community. The study formulates a collaborative model synthesis of input, process, and output/outcome components with replication potential for other rural areas.

Keywords: *Collaborative Model, Village Empowerment, Rumah Belajar Desa, Collaborative Governance, Community Economy.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi berbasis kewilayahan (Kartasasmita, 1996). Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah

perdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor produktif berbasis sumber daya lokal (Suharto, 2020).

Transformasi paradigma tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola potensinya sendiri, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor. Pada tingkat daerah, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan turut menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam perspektif teoretis, pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan bahwa penyelesaian permasalahan publik yang kompleks membutuhkan keterlibatan multi-aktor dalam proses kolaboratif yang terstruktur (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015).

Salah satu kerangka analisis yang relevan untuk memahami kolaborasi multi-aktor adalah model *Pentahelix* atau *Quintuple Helix*, yang mengintegrasikan lima elemen utama, yaitu pemerintah (*government*), akademisi (*academia*), dunia usaha (*business*), komunitas masyarakat (*community*), dan media (Carayannis & Campbell, 2010). Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, model ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menyinergikan peran seluruh pemangku kepentingan secara holistik (Halibas dkk., 2017). Pendekatan kolaboratif semacam ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan perdesaan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, sebagaimana ditegaskan oleh Chambers (1997) bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan suara masyarakat sebagai pusat proses perubahan.

Meskipun secara normatif desa memiliki peran strategis, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan implementasi di lapangan. Kondisi ini tercermin di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas lima desa (Long Beluah, Long Sam, Long Pari, Mara I, dan Mara Hilir) dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian bernilai tambah rendah. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025, sebanyak 75 desa di Kabupaten Bulungan menggantungkan mata pencaharian utama pada sektor pertanian, sementara hanya 31 desa yang memiliki produk unggulan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak terhadap model pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kolaborasi antar aktor pembangunan.

Kajian terdahulu mengenai pemberdayaan desa dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama. **Pertama, kelompok kajian yang berfokus pada penguatan SDM.** Hidayat dkk. (2022) dan Sutopo dkk. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat, namun belum mengintegrasikan peran *stakeholder* secara optimal. Wibowo dkk. (2023) membuktikan efektivitas pendekatan *community learning center* dalam peningkatan kapasitas, tetapi belum mengaitkannya dengan model kolaboratif antar aktor. Sejalan dengan itu, Fatimah dkk. (2022) dalam kajian pemberdayaan masyarakat UMKM melalui pengenalan *go-digital* di Kota Parepare mengonfirmasi bahwa pelatihan berbasis komunitas efektif meningkatkan kapasitas, namun memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Kedua, kelompok kajian yang berfokus pada kelembagaan BUMDes dan ekonomi desa. Susanti dkk. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat namun belum diimbangi penguatan SDM yang memadai. Rahman (2021) menegaskan bahwa keberhasilan Badan Usaha Milik Desa sangat bergantung pada kompetensi pengelola. Khadijah dkk. (2024) menemukan bahwa optimalisasi dana desa berdampak positif terhadap pengembangan BUMDes, namun masih terkendala kapasitas manajerial pengelola dan keterbatasan akses pasar.

Ketiga, kelompok kajian yang berfokus pada kolaborasi multi-stakeholder. Pratama dan Nugroho (2021) menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar *stakeholder* menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas program pemberdayaan desa. Kurniawan (2023) dan Yuliana dkk. (2023) menyoroti pentingnya sinergi pemerintah-masyarakat namun belum melibatkan sektor swasta dan akademisi secara optimal. Firmansyah dkk. (2024) dan Putri dan Adi (2024) menekankan pendekatan kolaboratif tanpa mengembangkan model yang mengintegrasikan SDM dan kelembagaan pembelajaran. Ladung dkk. (2025) menegaskan bahwa dukungan pemerintah desa berperan penting dalam memoderasi hubungan antara karakteristik individu dan partisipasi masyarakat, yang menjadi kunci keberlanjutan program pemberdayaan. Saputra dkk. (2025) menambahkan bahwa inovasi berbasis desa membutuhkan dukungan sistem pembelajaran yang berkelanjutan.

Dari sintesis ketiga kelompok kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pemberdayaan desa masih bersifat parsial, belum mengintegrasikan aspek SDM, peran *stakeholder*, dan sistem pembelajaran secara simultan, serta minim menghasilkan model kolaboratif yang aplikatif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana penguatan kapasitas SDM masyarakat melalui Program Rumah Belajar Desa? (2) Bagaimana peran dan dinamika kolaborasi *stakeholder* dalam pelaksanaan program? (3) Bagaimana

kontribusi program terhadap penguatan ekonomi masyarakat? (4) Bagaimana model kolaboratif pemberdayaan desa yang dapat dirumuskan dari temuan penelitian? Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan model kolaboratif pemberdayaan desa melalui Program Rumah Belajar Desa yang telah diimplementasikan sejak tahun 2024 di dua desa *pilot project*, yaitu Desa Long Beluah dan Desa Long Sam, dengan mengintegrasikan penguatan kapasitas SDM, peran *multi-stakeholder*, dan penguatan ekonomi masyarakat dalam satu kerangka konseptual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, dan makna pelaksanaan pemberdayaan desa melalui Program Rumah Belajar Desa dalam konteks nyata di lapangan (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus pada dua desa *pilot project*, yaitu Desa Long Beluah dan Desa Long Sam, yang dipilih karena menjadi lokasi awal implementasi program sejak tahun 2024 dan merepresentasikan kondisi desa di kecamatan tersebut.

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* yang dikembangkan lebih lanjut melalui teknik *snowball sampling*, terdiri atas unsur pemerintah kabupaten (Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), NGO pendamping (Ketua Yayasan Pioneer Bulungan), akademisi pendamping program, kepala desa dan pengelola Rumah Belajar Desa di kedua desa, serta anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai representasi masyarakat pelaku usaha. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah (RPJMDes, laporan desa), data Badan Pusat Statistik, laporan program, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama empat bulan (Januari–April 2026). Setiap informan diwawancarai sebanyak satu hingga dua sesi dengan durasi rata-rata 45–60 menit per sesi, menghasilkan total 14 sesi wawancara dari 10 informan. Selain wawancara, peneliti melakukan 8 kali kunjungan observasi partisipatif terhadap kegiatan Sekolah Lapang dan aktivitas KUPS di kedua desa (masing-masing 4 kunjungan per desa) selama periode pengumpulan data, dengan setiap kunjungan mencakup pengamatan proses produksi, dinamika kelompok, dan interaksi antar-aktor.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilengkapi dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar konsep dan mengembangkan model konseptual. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, *member check* kepada informan, serta diskusi sejawat (*peer debriefing*), sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Aspek etika penelitian dijaga melalui perolehan *informed consent* dari seluruh informan sebelum wawancara dilakukan, penggunaan inisial untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, serta penyampaian tujuan dan manfaat penelitian secara transparan. Mengingat penelitian melibatkan pejabat pemerintah dan masyarakat desa, peneliti memastikan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan tidak memberikan tekanan dalam bentuk apapun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan kunci dari berbagai unsur yang merepresentasikan level kebijakan hingga level tapak. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Inisial	Peran/Jabatan	Tingkat
1	R	Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan	Kabupaten (Regulator)
2	HM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kabupaten (Eksekutif Sektoral)
3	YS	Ketua Yayasan Pioneer Bulungan (NGO)	Kecamatan/Desa (Fasilitator)
4	Dr. A	Akademisi/Tim Ahli Pendamping Program	Universitas (Evaluator)
5	H	Kepala Desa Long Sam	Pemerintah Desa Long Sam
6	SA	Kepala Desa Long Beluah	Pemerintah Desa Long Beluah
7	Ibu N	Ketua KUPS Long Sam (VCO & Anyaman)	Masyarakat Long Sam
8	Ibu NT	Anggota KUPS Long Sam	Masyarakat Long Sam
9	Ibu RM	Anggota Kelompok Usaha Long Beluah	Masyarakat Long Beluah
10	Ibu SB	Anggota Kelompok Usaha Long Beluah	Masyarakat Long Beluah

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebelum Program Rumah Belajar Desa hadir, kondisi SDM di Kecamatan Tanjung Palas Barat ditandai oleh melimpahnya bahan baku alam namun minimnya kapasitas pengolahan, inovasi produk,

dan akses informasi pasar. Mayoritas informan perempuan sebelumnya hanya beraktivitas di ranah domestik atau bertani secara konvensional tanpa nilai tambah ekonomi. Motivasi utama masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk bergabung adalah keinginan memperoleh pengetahuan baru dan menambah pendapatan keluarga.

> *"Dulu kan saya cuma di rumah saja, mengurus dapur... Pas ada program Rumah Belajar ini masuk desa, saya ikut supaya bisa dapat ilmu baru... supaya bisa bantu-bantu suami juga" (Ibu RM, Desa Long Beluah).*

Melalui Rumah Belajar Desa, masyarakat menerima pelatihan yang disesuaikan dengan potensi alam desa masing-masing. Di Long Beluah, pelatihan difokuskan pada pengolahan pangan lokal (keripik singkong/pisang) dan teknik menganyam modern, sedangkan di Long Sam masyarakat dilatih memproduksi *Virgin Coconut Oil* (VCO), menganyam, dan mengolah selai buah lokal. Dampak non-ekonomi yang paling signifikan adalah rekonstruksi kepercayaan diri masyarakat, terutama perempuan, yang sebelumnya merasa minder dan enggan berinteraksi dengan dunia luar.

> *"Dulu cara pikir saya kan cuma 'yang penting kerja di kebun atau di rumah'. Sekarang pola pikir saya terbuka ke arah berwirausaha. Rasa percaya diri juga naik pesat..." (Ibu SB, Desa Long Beluah).*

Perubahan ini turut diamini oleh pendamping lapangan, yang menegaskan bahwa hasil paling mendasar dari program adalah perubahan posisi masyarakat dari pasif menjadi aktif, dan dari minder menjadi percaya diri (YS, Ketua Yayasan Pioneer).

Pelaksanaan Program Rumah Belajar Desa

Rumah Belajar Desa dikonsepkan sebagai ruang perjumpaan nonformal (agregator) yang berfungsi sebagai wadah diskusi, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pemberdayaan warga. Proses perencanaan kegiatan berjalan secara partisipatif (*bottom-up*), dimulai dari pemetaan potensi sosial-ekonomi, analisis kebutuhan (SWOT), penyusunan linimasa triwulanan oleh koordinator tingkat kecamatan, hingga pelaksanaan Sekolah Lapang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menekankan sifat nonformal dari mekanisme pembelajaran ini:

> *"Namanya Rumah Belajar Desa, artinya semua pihak boleh berbicara... Kita membangunnya itu bagaimana seperti kita ngobrol sambil ngopi, sambil santai, tetapi kita mempunyai satu agenda yang nantinya bisa direkomendasikan" (HM, Kepala DPMD Kabupaten Bulungan).*

Partisipasi warga dinilai tinggi, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala operasional berupa keterbatasan waktu warga akibat benturan agenda keluarga, minimnya peralatan produksi modern, serta tantangan logistik pengiriman barang ke luar desa yang dipengaruhi kondisi geografis. Untuk mengatasi kendala waktu, fasilitator lapangan menerapkan penjadwalan fleksibel yang disesuaikan dengan siklus pertanian dan kesibukan domestik warga, dengan sesi pelatihan dilakukan secara bergilir pada sore hari atau akhir pekan. Keterbatasan peralatan diatasi melalui pengadaan peralatan secara bertahap menggunakan dana desa dan bantuan dari Yayasan Pioneer, sementara tantangan logistik diminimalkan melalui sistem pengiriman kolektif yang dikoordinasikan oleh KUPS dengan memanfaatkan jaringan distribusi Yayasan Pioneer ke kota kabupaten (YS, Ketua Yayasan Pioneer; H, Kepala Desa Long Sam).

Kontribusi terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat merupakan muara utama Program Rumah Belajar Desa. Untuk mengelola hasil pelatihan secara berkelanjutan, masyarakat diwadahi dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengelola dan membagikan hasil penjualan produk secara kolektif kepada anggota sebagai pendapatan tambahan. Dari segi volume dan nilai, hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang signifikan: kelapa mentah yang sebelumnya dijual kepada tengkulak dengan harga Rp2.000–Rp3.000 per butir kini diolah menjadi VCO yang bernilai jual Rp80.000–Rp120.000 per 250 ml, meningkatkan nilai tambah produk hingga **lebih dari 20 kali lipat**. Selai buah lokal yang semula tidak memiliki nilai komersial kini dipasarkan dengan harga Rp35.000–Rp50.000 per toples. Secara keseluruhan, KUPS Long Sam dengan 15 anggota aktif dan kelompok usaha Long Beluah dengan 12 anggota aktif masing-masing mampu menghasilkan omzet rata-rata Rp3.000.000–Rp5.000.000 per bulan dari penjualan kolektif, yang didistribusikan sebagai pendapatan tambahan bagi tiap anggota. Lompatan terbesar dalam aspek ekonomi terletak pada perluasan wilayah pemasaran: produk anyaman, VCO, dan selai tidak lagi hanya dipasarkan di warung desa, tetapi juga dititipkan ke gerai ritel modern di kota kabupaten melalui bantuan Yayasan Pioneer.

Pencapaian signifikan lainnya adalah partisipasi produk KUPS dalam pameran UMKM Nasional yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2025, di mana produk VCO dan anyaman Long Sam berhasil menarik minat pembeli dari luar Kalimantan. Menurut keterangan YS (Ketua Yayasan Pioneer), pameran tersebut menghasilkan penjualan langsung dan pesanan lanjutan (*repeat order*) dari beberapa *buyer* di Bali dan Jawa, meskipun data nilai transaksi secara rinci belum terdokumentasi secara sistematis oleh kelompok usaha.

"Awalnya dulu kendalanya orang ragu sama produk kampung begini. Karena belum ada sertifikatnya kan. Tapi pas dibantu urus sertifikat Halal sama P-IRT, sekarang produk kami sudah dilirik dan banyak yang beli" (Ibu N, KUPS Long Sam).

Perluasan pasar tersebut hanya dapat terjadi setelah pengelola program memfasilitasi legalitas usaha berupa izin P-IRT dan sertifikasi Halal, yang menjadi kunci utama dalam menghilangkan keraguan konsumen terhadap produk-produk asal desa pedalaman.

Kolaborasi Multi-Stakeholder

Keberhasilan Rumah Belajar Desa tidak terlepas dari penerapan model kolaborasi *Pentahelix* yang menyinergikan peran pemerintah, NGO, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan melegalkan program ini ke dalam dokumen perencanaan daerah formal, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga RPJMDes tingkat desa.

"Terkait dengan Rumah Belajar Desa... itu melalui komitmen kepala daerah, wakil kepala daerah, maupun Sekda... secara formal kita legalitaskan dalam bentuk RPJMD, termasuk juga RKPD, sampai ke RPJMDes" (R, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan).

Yayasan Pioneer Bulungan berperan sebagai mitra strategis yang menggerakkan program di tingkat tapak dengan menempatkan fasilitator lokal yang menetap di desa untuk pendampingan teknis, penguatan kelembagaan KUPS, dan fasilitasi perizinan produk. Sementara itu, akademisi berperan sebagai *knowledge enabler* melalui tiga kontribusi utama, yaitu penyusunan kurikulum pembelajaran nonformal berbasis metode "Sekolah Lapang", pengawalan *transfer* pengetahuan untuk hilirisasi komoditas lokal, serta evaluasi independen terhadap dampak dan prospek replikasi program.

Dalam kerangka *Pentahelix*, peran sektor swasta (*business/private sector*) sebagai elemen kelima belum terlibat secara signifikan dalam program ini. Keterlibatan swasta baru sebatas pada penerimaan produk titipan di gerai ritel modern dan partisipasi pasif dalam pameran. Belum terdapat kemitraan formal dengan perusahaan atau korporasi dalam bentuk pendanaan, transfer teknologi, maupun pembinaan manajemen usaha.

Rendahnya keterlibatan sektor swasta disebabkan oleh tiga faktor utama. *Pertama*, lokasi geografis desa di pedalaman Kalimantan Utara yang sulit dijangkau menjadikan biaya logistik tinggi sehingga kurang menarik bagi korporasi berskala besar. *Kedua*, volume produksi KUPS yang masih terbatas belum memenuhi skala minimum pemesanan (*minimum order quantity*) yang biasanya dipersyaratkan oleh jaringan ritel atau distributor nasional. *Ketiga*, belum adanya strategi pemasaran digital dan *branding* produk yang terstruktur menyebabkan produk desa belum dikenal secara luas oleh pelaku usaha di luar wilayah.

Untuk mengintegrasikan sektor swasta secara lebih substansial, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi konkret: (1) membangun kemitraan *off-taking agreement* dengan perusahaan pangan atau koperasi modern yang menjamin penyerapan produk dengan harga dan kuantitas yang disepakati; (2) memanfaatkan program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bulungan untuk pendanaan peralatan produksi dan pelatihan *digital marketing*; serta (3) mengembangkan *e-commerce* berbasis platform digital lokal yang dapat mengatasi hambatan jarak geografis dan memperluas jangkauan pasar tanpa bergantung pada jaringan distribusi konvensional.

Sinergi kolaborasi juga mengakar di level horizontal kemasyarakatan, di mana warga yang tidak tergabung dalam KUPS tetap berpartisipasi dengan menyuplai bahan baku mentah kepada kelompok usaha, menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berlangsung di level elite kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari relasi sosial ekonomi sehari-hari masyarakat desa.

Pembahasan

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Model pemberdayaan yang diterapkan melalui Rumah Belajar Desa merefleksikan pergeseran paradigma pembangunan dari model *top-down* menjadi model *bottom-up* yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (*community-led development*). Secara teoretis, proses pemberdayaan yang berlangsung sejalan dengan konsep pemberdayaan Suharto (2020) dan Kartasasmita (1996) yang mencakup tiga tahapan: penyadaran (*mindset shifting*) yang meruntuhkan rasa minder dan sikap pasif masyarakat; pengkapasitasan (*capacity building*) melalui metode Sekolah Lapang yang menekankan praktik langsung mulai dari produksi hingga pengurusan izin; dan pemberian daya (*enabling*) melalui pengelompokan warga ke dalam KUPS untuk menjamin keberlanjutan ekonomi kolektif. Chambers (1997) menegaskan bahwa proses pemberdayaan yang autentik harus berangkat dari realitas dan suara masyarakat itu sendiri, dan temuan penelitian ini mengonfirmasi prinsip tersebut melalui mekanisme pembelajaran partisipatif di Rumah Belajar Desa.

Proses hilirisasi komoditas lokal, dari kelapa mentah menjadi VCO dan buah lokal menjadi selai, secara nyata melipatgandakan nilai jual produk sekaligus memutus rantai ketergantungan warga pada tengkulak. Transformasi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat desa

dapat dicapai melalui penguatan kapasitas pengolahan dan perluasan akses pasar, sebagaimana juga ditunjukkan dalam konteks pemberdayaan UMKM di wilayah perdesaan lain (Fatimah dkk., 2022; Khadijah dkk., 2024).

Perbandingan Antar Desa: Dinamika Kolaborasi di Long Beluah dan Long Sam

Desain studi kasus ganda memungkinkan perbandingan *cross-case* yang memperkaya pemahaman tentang variasi implementasi model kolaboratif di dua konteks desa yang berbeda. Meskipun kedua desa berada dalam satu kecamatan dan mengikuti kerangka program yang sama, dinamika kolaborasi menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Di Desa Long Sam, KUPS berkembang lebih cepat karena ditopang oleh ketersediaan bahan baku kelapa yang melimpah dan kohesi sosial masyarakat yang kuat. Kelompok usaha VCO di Long Sam memiliki 15 anggota aktif yang secara rutin berproduksi dua hingga tiga kali per minggu, dengan pembagian kerja yang jelas mulai dari pengumpulan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Kepemimpinan Ibu N sebagai ketua KUPS yang proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Yayasan Pioneer dan mengurus perizinan menjadi faktor akselerator utama. Sebaliknya, di Desa Long Beluah, proses pemberdayaan menghadapi tantangan lebih besar karena basis keterampilan masyarakat yang lebih rendah dan kebiasaan berproduksi secara individual. Kelompok usaha Long Beluah dengan 12 anggota aktif membutuhkan waktu adaptasi lebih lama untuk membangun kebiasaan produksi kolektif. Namun, keunggulan Long Beluah terletak pada diversifikasi produk yang lebih variatif keripik, anyaman, dan olahan pangan yang mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas.

Perbandingan ini mengonfirmasi temuan Ostrom (1990) bahwa keberhasilan tata kelola kolektif dipengaruhi oleh modal sosial dan kepemimpinan lokal, serta menunjukkan bahwa model Rumah Belajar Desa cukup fleksibel untuk diadaptasi sesuai karakteristik sosio-ekonomi masing-masing desa. Perbedaan kecepatan adopsi antar kedua desa juga memberikan pembelajaran penting bahwa replikasi model pada wilayah lain perlu mempertimbangkan kesiapan sosial dan ketersediaan sumber daya alam sebagai prasyarat keberhasilan.

***Collaborative Governance* dan Model Pentahelix**

Merujuk pada kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) serta pengembangan lebih lanjut oleh Emerson dan Nabatchi (2015), keberlanjutan Rumah Belajar Desa ditopang oleh tiga pilar utama. *Pertama*, kesamaan visi dan komitmen bersama antar seluruh aktor *Pentahelix* yang diwujudkan melalui integrasi kebijakan formal dari tingkat kabupaten hingga desa. *Kedua*, hubungan saling percaya (*trust building*) yang dibangun melalui keterbukaan informasi dan ruang diskusi rutin tanpa sekat birokrasi, sehingga meminimalkan konflik kepentingan. Hal ini konsisten dengan temuan Ladung dkk. (2025) bahwa dukungan pemerintah desa berperan signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat. *Ketiga*, pembagian peran yang saling melengkapi, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran serta infrastruktur, NGO mengisi celah keterbatasan jangkauan birokrasi melalui pendampingan lapangan yang fleksibel, akademisi menyediakan landasan teoretis dan evaluasi independen, sementara masyarakat berperan aktif sebagai motor penggerak produksi (Carayannis & Campbell, 2010; Halibas dkk., 2017).

Temuan ini memperkuat dan memperluas hasil kajian terdahulu (Pratama & Nugroho, 2021; Firmansyah dkk., 2024) yang menegaskan pentingnya sinergi antar aktor, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum mengintegrasikan penguatan SDM dengan tata kelola kolaboratif secara simultan. Keberhasilan kolaborasi pembangunan desa juga dipengaruhi oleh kesesuaian program dengan nilai-nilai budaya setempat, sejalan dengan pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam Rumah Belajar Desa.

Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi orisinal yang membedakannya dari kajian terdahulu. *Pertama*, berbeda dari penelitian Pratama dan Nugroho (2021) serta Firmansyah dkk. (2024) yang menganalisis kolaborasi multi-aktor tanpa mengaitkannya dengan sistem pembelajaran masyarakat, penelitian ini mengintegrasikan dimensi *collaborative governance* dengan penguatan SDM melalui mekanisme pembelajaran nonformal (Sekolah Lapang) dalam satu kerangka analitis. *Kedua*, penelitian ini memperkenalkan konsep Rumah Belajar Desa sebagai *third space* ruang ketiga yang menjembatani birokrasi formal dan masyarakat nonformal sebuah dimensi yang belum dieksplor dalam literatur pemberdayaan desa di Indonesia. Konsep ini memperluas kerangka *Pentahelix* (Carayannis & Campbell, 2010) dengan menambahkan mekanisme penghubung antar aktor yang selama ini menjadi *missing link* dalam implementasi kolaborasi di tingkat tapak. *Ketiga*, melalui desain studi kasus ganda, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan model kolaboratif bersifat kontekstual dipengaruhi oleh modal sosial, kepemimpinan lokal, dan kesiapan sumber daya alam sehingga menawarkan panduan replikasi yang lebih realistis dibanding model pemberdayaan generik yang mengabaikan variasi lokal.

Sintesis Model Kolaboratif Pemberdayaan Desa

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menyusun sintesis model kolaboratif pemberdayaan desa berbasis Rumah Belajar Desa yang terdiri atas tiga komponen. Komponen *input* mencakup landasan dan isu sektoral, yaitu kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan kapasitas SDM yang masih terbatas, serta komitmen kebijakan daerah melalui skema *Integrated Area Development*. Komponen *process* menggambarkan mekanisme kolaborasi di Rumah Belajar Desa yang berfungsi sebagai ruang ketiga (*third space*) penghubung birokrasi formal dan masyarakat nonformal, dicirikan oleh pembelajaran nonformal, metode Sekolah Lapang, dan kepemimpinan kolaboratif di tingkat kecamatan dan desa. Komponen *output* dan *outcome* menunjukkan bahwa dampak program tidak berhenti pada peningkatan keterampilan individu, tetapi menghasilkan transformasi kelembagaan dan keberlanjutan sistem, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Sintesis Model Kolaboratif Pemberdayaan Desa

Aspek	Kondisi Sebelum Kolaborasi	Hasil/Output Setelah Kolaborasi
Kapasitas SDM	Minder, pemalu, berfokus pada kegiatan domestik	Percaya diri, berani berwirausaha dan mempromosikan produk
Kelembagaan Ekonomi	Usaha perorangan, tanpa legalitas, produk diragukan pasar	Terbentuk KUPS (27 anggota aktif di 2 desa) dengan izin P-IRT dan sertifikasi Halal
Akses Pasar	Terjebak penjualan lokal dengan harga murah (kelapa Rp2.000–3.000/butir)	Hilirisasi ke VCO (Rp80.000–120.000/250ml); menembus ritel modern kota hingga pameran nasional
Sinergi Kebijakan	Program dinas bersifat top-down dan tumpang tindih	Terintegrasi ke Musrenbangdes, RPJMDes, hingga RPJMD

Sumber: Hasil analisis data primer, 2026.

Secara jangka panjang, model kolaboratif ini berpotensi menciptakan skema keberlanjutan rantai pasok (*supply chain*), di mana produk kelompok binaan diproyeksikan mengisi pasar-pasar potensial di Kabupaten Bulungan, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga penyerapan tenaga kerja di kawasan industri hijau. Temuan ini membuktikan bahwa Rumah Belajar Desa bukan sekadar tempat pelatihan, melainkan model agregator pemberdayaan yang mampu mengubah komoditas lokal menjadi penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Program Rumah Belajar Desa berhasil menguatkan kapasitas SDM masyarakat, khususnya perempuan, melalui metode Sekolah Lapang yang partisipatif, mendorong perubahan *mindset* dari pasif menjadi berdaya secara ekonomi, serta merekonstruksi kepercayaan diri masyarakat desa.
2. Pelaksanaan program didukung oleh perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan Rumah Belajar Desa berfungsi sebagai ruang perjumpaan nonformal yang menghubungkan birokrasi formal dan masyarakat.
3. Program berkontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi komoditas lokal, pembentukan KUPS, dan fasilitasi legalitas usaha (P-IRT dan sertifikasi Halal) yang memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional.
4. Keberhasilan program ditopang oleh model *collaborative governance* berbasis *Pentahelix* yang menyinergikan pemerintah, NGO, akademisi, dan masyarakat, meskipun peran sektor swasta masih perlu diperkuat.
5. Penelitian ini menghasilkan sintesis model kolaboratif pemberdayaan desa berbasis komponen *input*, *process*, dan *output/outcome* yang berpotensi direplikasi pada wilayah perdesaan lain.

Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, direkomendasikan hal-hal berikut: (1) Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu memperluas implementasi program ke desa-desa lain di Kecamatan Tanjung Palas Barat dan kecamatan lainnya, disertai alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. (2) Pelibatan sektor swasta perlu diperkuat melalui skema CSR, kemitraan usaha, dan *off-taking agreement* untuk menjamin keberlanjutan pemasaran produk. (3) Dokumentasi dan pengukuran dampak ekonomi secara kuantitatif perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. (4) Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif, serta memperluas cakupan wilayah penelitian untuk menguji replikabilitas model pada konteks perdesaan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), 41–69. https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press. https://doi.org/10.1353/book.40918

Fatimah, F., Arfianty, A., Nurwani, N., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2022). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui kegiatan pengenalan go-digital bagi UMKM di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare. MALLOMO: Journal of Community Service, 2(2), 89–93.

Firmansyah, D., Rahmawati, L., & Hadi, S. (2024). Collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10(1), 45–60.

Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The Penta Helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 12, 159–174. https://doi.org/10.28945/3735

Hidayat, R., Suryadi, A., & Putra, D. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis komunitas dalam meningkatkan ekonomi desa. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(2), 112–125.

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. CIDES.

Khadijah, N., Rahma, R., & Harun, H. (2024). Optimalisasi dana desa terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Journal AK-99, 4(1), 118–127.

Kurniawan, A. (2023). Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Ekonomi Desa, 5(1), 23–35.

Ladung, F., Hardiansa, Y., & Harun, H. (2025). Peran dukungan pemerintah desa terhadap hubungan karakteristik individu dan partisipasi masyarakat desa. Cateris Paribus Journal, 5(2), 120–126.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pratama, R., & Nugroho, Y. (2021). Peran stakeholder dalam pembangunan desa berbasis kolaboratif. Jurnal Kebijakan Publik, 12(3), 201–214.

Putri, M., & Adi, S. (2024). Model pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12(1), 55–70.

Rahman, F. (2021). Kompetensi pengelola dalam keberhasilan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Manajemen Desa, 6(2), 77–89.

Saputra, H., Widodo, T., & Lestari, N. (2025). Inovasi desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Jurnal Inovasi Pembangunan, 11(1), 1–15.

Suharto, E. (2020). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.

Susanti, D., Amelia, R., & Fauzi, A. (2020). Kontribusi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 4(1), 15–28.

Sutopo, B., Winarno, B., & Santoso, P. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 98–110.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibowo, A., Prasetyo, B., & Laksmi, R. (2023). Community learning center sebagai strategi peningkatan kapasitas masyarakat desa. Jurnal Pendidikan Nonformal, 18(1), 33–47.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.

Yuliana, S., Rahman, F., & Hidayati, N. (2023). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2), 145–158.